

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara berkembang yang mempunyai permasalahan, yaitu salah satunya kesenjangan ekonomi atau biasa disebut dengan ketimpangan distribusi pendapatan. Ketimpangan pendapatan merupakan sekelompok masyarakat yang memiliki penghasilan tinggi dan sekelompok masyarakat berpenghasilan rendah, serta tingkat kemiskinan yang tinggi atau jumlah orang yang berada dibawah garis kemiskinan. Dalam realitanya sendiri pada negara – negara berkembang, kesenjangan ekonomi atau ketimpangan pendapatan masih menjadi sebuah isu yang penting untuk diatasi.

Pembangunan nasional yang merupakan suatu proses dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas hidup penduduk di suatu wilayah. Pada dasarnya, tujuan dari pembangunan adalah mengatasi permasalahan yang terjadi di suatu negara dengan harapan terwujudnya kemajuan di berbagai sektor. Namun, Indonesia seringkali menghadapi berbagai tantangan terutama dalam kesejahteraan masyarakat yang belum mampu dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka. Rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat menjadi indikator adanya masalah ekonomi salah satunya ketimpangan distribusi pendapatan.

Menurut (World Bank, 2016), terdapat empat penyebab ketimpangan di Indonesia, yaitu: pertama, banyak masyarakat yang kurang mampu menghadapi ketidaksetaraan dalam kehidupannya sehingga menghambat mereka dalam memperoleh kesuksesan di masa depan. Kedua, para pekerja yang memiliki

keterampilan tinggi cenderung menerima upah yang tinggi, sedangkan pekerja yang tidak memiliki keterampilan tinggi cenderung terjebak dalam produktivitas rendah dan menerima upah yang rendah. Ketiga, sekelompok individu yang memiliki aset untuk menginginkan tercapainya keuntungan yang didapatkannya terkadang diperoleh dari hasil praktik korupsi, sehingga hal ini dapat meningkatnya ketimpangan ekonomi baik dalam konteks saat ini maupun periode yang akan datang. Keempat, semakin sering terjadinya guncangan ekonomi berdampak pada sekelompok masyarakat miskin, dikarenakan ketidakmampuan mereka dalam memperoleh penghasilan dan menginvestasikannya dalam aspek kesehatan dan pendidikan dalam meningkatkan kondisi ekonominya tersebut.

Secara umum, ketimpangan pendapatan di Indonesia tampak dengan jelas adanya perbedaan pertumbuhan ekonomi antara wilayah barat dengan wilayah timur Indonesia. Sehingga dalam konteks pembangunannya tidak hanya berfokus pada pencapaian pertumbuhan ekonominya, tetapi juga dilihat dari distribusi dan pemerataan hasil pembangunannya. Oleh karena itu, pentingnya memastikan bahwa manfaat sebuah pembangunan dapat dirasakan oleh semua lapisan masyarakat dengan adil dan sebanding dengan menciptakan keseimbangan dalam kemajuan antar wilayah tersebut. Adapun dapat dilihat perkembangan Indeks Gini

Di Indonesia pada tahun 2022 sebagai berikut :



Sumber : BPS Indonesia

Gambar 1.1 Indeks Gini Di Indonesia

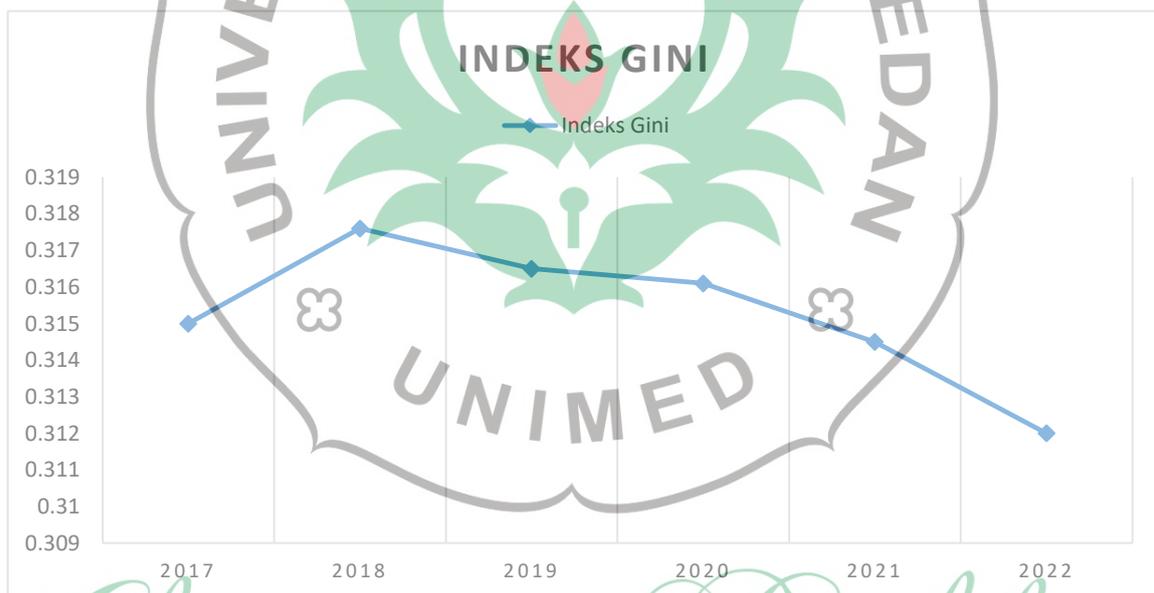
Pada tahun 2022, Indeks Gini pada tingkat Indonesia secara keseluruhan sebesar 0.384. Pada Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Indeks Gini mengalami penurunan sebesar 0.236 yang disebabkan oleh pertumbuhannya meningkat sebesar 6,55%. Pertumbuhan ekonomi cukup tinggi diatas rata-rata nasional yang sebesar 5.31%, sehingga hal ini dikarenakan meningkatnya UMK di Kabupaten/Kota dan hal ini berpengaruh terhadap pendapatan para pekerja tersebut. Di Provinsi Yogyakarta Indeks Gini mengalami kenaikan sebesar 0.439 disebabkan oleh tingginya tingkat inflasi pada tahun 6,49% sehingga mengakibatkan naiknya harga kebutuhan pokok sehingga dampak inflasi ini memberatkan masyarakat berpenghasilan rendah, sehingga mereka sulit memenuhi kebutuhan dasarnya dan banyak pendatang melakukan urbanisasi ke Yogyakarta sehingga berpotensi pada melebarnya ketimpangan sosial dan ekonomi dan pada sektor pariwisata akibat covid 19 banyak penduduk kehilangan pekerjaan dan penghasilannya sehingga

berakibat pada memburuknya distribusi pendapatan. Dan pada Provinsi Papua Indeks Gini sebesar 0.406, hal ini dikarenakan harga kebutuhan pokok yang tinggi akibat mendistribusikan barangnya dengan menggunakan transportasi untuk melakukan perjalanan, sehingga berakibat pada ongkos yang mahal untuk daerah terpencil, adanya perbedaan pembangunan antara kota dengan daerah terpencil yang semakin melebar sehingga berakibat terjadinya ketimpangan pembangunan. Dan tingginya angka pengangguran terbuka mencapai sebesar 11.8%.

Ketimpangan pendapatan menjadi isu yang krusial dalam konteks pembangunan di setiap negara. Tingginya tingkat ketimpangan pendapatan menandakan bahwa distribusi pendapatan di masyarakat semakin tidak merata, keadaan inilah yang akan memperbesar kesenjangan antara masyarakat yang memiliki tingkat ekonomi yang baik dengan mereka yang memiliki pendapatan yang rendah (Febriyani & Anis, 2021). Ketimpangan pendapatan dapat diukur menggunakan metode perhitungan indeks gini atau gini ratio, kisaran yaitu 0 sampai 1 yang dimana ketika mendekati angka 1 menandakan semakin tinggi nilai koefisien gini maka tingkat ketimpangan pendapatan semakin tinggi. Dan sebaliknya, mendekati angka 0 semakin rendah nilai koefisien gini maka tingkat distribusi pendapatan semakin merata.

Pada saat ini Provinsi Sumatera Utara merupakan provinsi terbesar diluar Pulau Jawa dari jumlah penduduk terbanyak di wilayah Indonesia, yang memiliki peran kegiatan perkonomiannya seperti : perkebunan, perindustrian, perdagangan, pertambangan, pariwisata keuangan, dan jasa. Provinsi Sumatera Utara memiliki 25 Kabupaten dan 8 kota yang masing – masing memiliki potensi yang berbeda di

setiap kota dan wilayah. Dalam peran perekonomiannya Provinsi Sumatera Utara ini Industri pertanian masih memegang bagian penting dalam pembentukan PDRB di semua Kabupaten, dengan sumber lainnya dalam wilayah kota berasal dari industri selain pertanian. Sehingga secara keseluruhan mencerminkan adanya potensi dan dinamika pembangunan di setiap kabupaten dan kota yang pada akhirnya mempengaruhi ketidaksetaraan dalam distribusi pendapatan.



Sumber: BPS Sumatera Utara

Gambar 1.2 Grafik Indeks Gini Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 – 2022

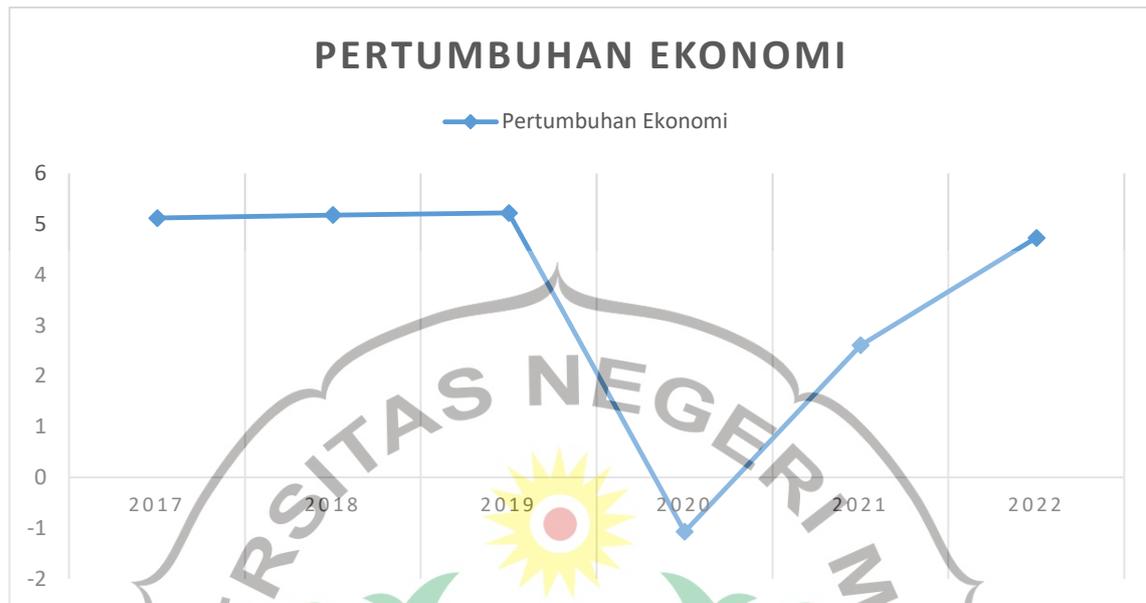
Indeks Gini di Sumatera Utara cenderung mengalami penurunan dari tahun 2017 – 2022. Dapat dilihat dari grafik 1.1 Indeks Gini di tahun 2017 sebesar 0.315, namun di tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar 0.3176. Pada tahun 2018, mempengaruhinya dikarenakan adanya kenaikan rata – rata pengeluaran perkapita perbulan pada kelompok penduduk 40% terbawah lebih cepat dibanding kelompok penduduk 40% menengah dan kelompok penduduk 20% teratas. Sehingga hal ini

mengindikasikan bahwa Provinsi Sumatera Utara perlu mengambil langkah – langkah kebijakan untuk dapat memperkecil ketimpangan tersebut, Pemerintah perlu memberikan stimulus dalam meningkatkan distribusi pengeluaran khususnya kelompok 40% terbawah agar ketimpangan lebih merata. Faktor yang harus dibenahi dalam menekan indeks gini ini adalah perbaikan dalam bidang pendidikan, kesehatan. Kemiskinan dan lapangan pekerjaan. Dan ditahun 2020 mengalami penurunan sebesar 0.3161 akibat adanya Covid 19 yang melanda di seluruh dunia sehingga hal ini berpengaruh terhadap perekonomian global dan nasional termasuk di Sumatera Utara. Hal ini menunjukkan belum meratanya pembangunan dan perekonomian yang membaik. (Todaro & Smith, 2012) menyatakan bahwa inefisiensi ekonomi akan menyebabkan ketimpangan pendapatan, dikarenakan proporsi masyarakat yang dapat memenuhi persyaratan tersebut menurun seiring meningkatnya ketimpangan. Hal ini akan meningkatkan kesenjangan pendapatan antara mereka yang berada dalam kondisi ekonomi yang relatif lebih baik dengan mereka berada dalam kondisi ekonomi yang lebih rendah.

Seperti yang dikemukakan Kuznetz (Rahman & Putri, 2021) menyatakan bahwa pada tahapan awal perkembangannya, distribusi pendapatan tidak merata namun seiring berjalannya waktu distribusi pendapatan akan menjadi lebih merata pada tahap perkembangan tertentu. Dikarenakan hal ini dapat diartikan bahwa semakin tinggi pertumbuhan ekonomi, pendapatan perkapita juga meningkat, namun seiring berjalannya waktu kesenjangan antar kelompok kaya dan miskin juga semakin besar. Hal ini dapat mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi memberikan keuntungan kepada golongan tertentu. Selain itu, pembangunan di

suatu daerah yang tidak diikuti dengan daerah yang lain tidak akan mendorong terjadinya pemerataan di wilayah tersebut. Fenomena ini dapat menunjukkan bahwa adanya hubungan negatif antara pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan. Dan dikarenakan tidak meratanya suatu pembangunan di berbagai wilayah, pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak selalu memberikan dampak positif terhadap ketimpangan pendapatan.

Banyak faktor – faktor yang mempengaruhi Ketimpangan Pendapatan salah satunya Pertumbuhan ekonomi. Dikarenakan pembangunan ekonomi yang substansial dan pemerataan pendapatan diperlukan untuk meningkatkan standar hidup masyarakat. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan laju pertumbuhannya dapat digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi. Ekspansi ekonomi yang cepat sering kali menghasilkan distribusi pendapatan yang tidak merata, hal ini terjadi dikarenakan ekspansi ekonomi sering kali mengabaikan pertumbuhan ekonomi dengan pergeseran komposisi ekonominya tersebut. Dalam proses pembangunan ekonomi, penting dilihat dari pemerataan ekonomi secara bersamaan, karena dapat meningkatkan kesenjangan antara satu kelompok masyarakat dengan kelompok masyarakat lainnya, apabila tidak ada yang mendorong pemerataan ekonomi untuk mencapai kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan. (Zusanti et al., 2020)



Sumber: BPS Sumatera Utara

Gambar 1.3 Grafik Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sumatera Utara Tahun
2017 – 2022

Berdasarkan Gambar 1.3 menunjukkan bahwa dari tahun 2017 - 2019 pertumbuhan ekonomi di Sumatera Utara cenderung stabil. Hal ini diakibatkan tingkat inflasi yang mengalami penurunan. Penyebab menurunnya tingkat inflasi ini adalah stabilnya harga komoditas bumbu-bumbuan terutama pada cabai merah yang sebelumnya melonjak cukup tajam. Selain menurunnya tingkat inflasi penyebab lainnya pertumbuhan ekonomi mulai stabil dikarenakan dalam sektor pariwisata menunjukkan tren positif terhadap pertumbuhan ekonomi sehingga mendorong dalam meningkatnya jumlah wisatawan domestik maupun mancanegara, sektor yang terkait seperti: perhotelan, restoran dan transportasi. Namun berbanding terbalik dengan Indeks Gini pada tahun 2017 – 2019 menunjukkan perkembangan yang berfluktuasi. Hal ini dikarenakan beberapa faktor penyebabnya, yaitu: adanya perubahan dalam struktur distribusi pendapatan, meningkatnya biaya hidup seseorang akibat struktur ekonomi daerahnya. Pada tahun 2017 Indeks Gini sebesar 0.315 mengalami penurunan dikarenakan menurunnya tingkat kemiskinan dan

meningkatnya pendapatan masyarakat dan di tahun 2018 Indeks Gini meningkat kembali sebesar 0.3176, Namun Indeks Gini pada tahun 2018 masih jauh tergolong kategori yang rendah daripada Indeks Gini Nasional sebesar 0.389. Salah satu faktor yang mempengaruhinya dikarenakan adanya kenaikan rata – rata pengeluaran perkapita perbulan pada kelompok penduduk 40% terbawah lebih cepat dibanding kelompok penduduk 40% menengah dan kelompok penduduk 20% teratas. Sehingga hal ini mengindikasikan bahwa Provinsi Sumatera Utara perlu mengambil langkah – langkah kebijakan untuk dapat memperkecil ketimpangan tersebut, Pemerintah perlu memberikan stimulus dalam meningkatkan distribusi pengeluaran khususnya kelompok 40% terbawah agar ketimpangan lebih merata. Faktor yang harus dibenahi dalam menekan indeks gini ini adalah perbaikan dalam bidang pendidikan, kesehatan, kemiskinan dan lapangan pekerjaan.

Secara teori, apabila pertumbuhan ekonomi meningkat maka ketimpangan pendapatan menurun tidak sesuai dengan pernyataan yang dikemukakan oleh Kuznets yang menyatakan bahwa pada tahapan awal perkembangannya, distribusi pendapatan tidak merata namun seiring berjalannya waktu distribusi pendapatan akan menjadi lebih merata pada tahap perkembangan tertentu. Dikarenakan hal ini diartikan bahwa semakin tinggi pertumbuhan ekonomi, pendapatan perkapita juga meningkat, namun seiring berjalannya waktu kesenjangan antar kelompok kaya dan miskin juga semakin besar. Hal ini dapat mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi memberikan keuntungan kepada golongan tertentu. Selain itu, pembangunan di suatu daerah yang tidak diikuti dengan daerah yang lain tidak akan mendorong terjadinya pemerataan di wilayah tersebut.

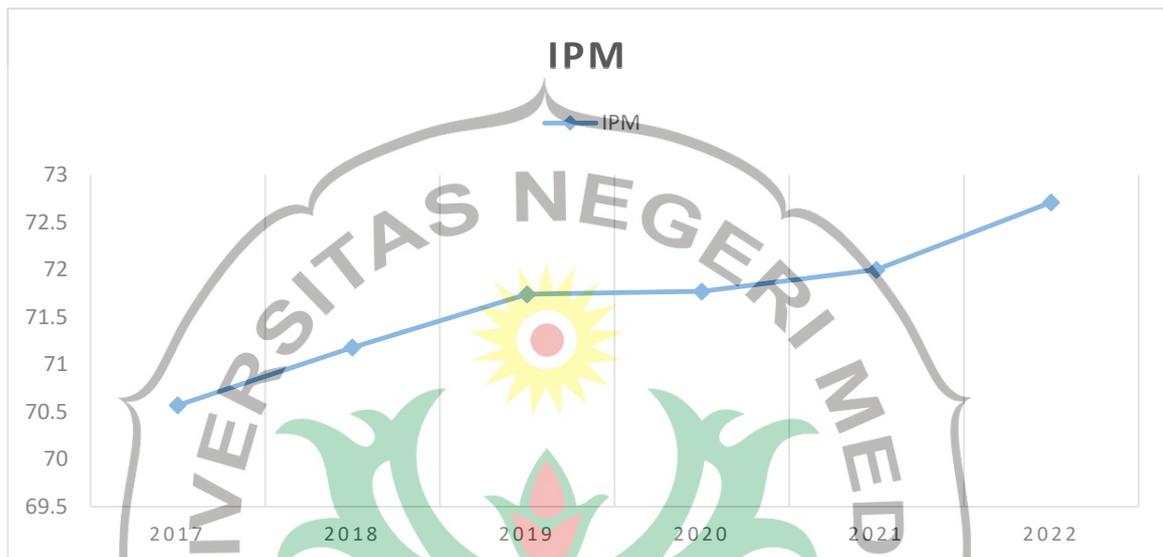
Kajian yang mengaitkan pertumbuhan ekonomi dengan ketimpangan pendapatan sudah ada peneliti sebelumnya, namun masih terdapat kesejangan hasil riset. Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Muslimah & Putri, 2021) menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap ketimpangan pendapatan dikarenakan pertumbuhan ekonomi yang terjadi tidak secara langsung mengurangi ketimpangan pendapatan. Hal ini disebabkan karena pada setiap wilayah, kondisi pertumbuhan perekonomian cenderung mengalami perbedaan sumber daya yang tidak sama serta pada sektor perekonomian cenderung mengalami permasalahan pasang surut serta terjadinya ketidakstabilan yang terjadi di setiap waktu.

Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh (Putri Y et al., 2015) menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Hal ini dikarenakan pertumbuhan ekonomi yang meningkat di suatu daerah, tetapi tidak diikuti oleh peningkatan pertumbuhan ekonomi di daerah lain maka akan menyebabkan ketimpangan pembangunan menjadi semakin tinggi, dikarenakan pada tahap awal pembangunan yang dilakukan oleh pelaku ekonomi senang melakukan kegiatan berinvestasi pada daerah – daerah relatif maju yang dilihat dari infrastrukturnya, tenaga kerja yang sudah terlatih serta adanya peluang melakukan bisnis pada daerah sudah tergolong maju dan pada keadaan ini dapat mendorong naiknya pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut. Dan begitu juga sebaliknya, apabila kondisi daerah tersebut mengalami ketinggalan atau terbatasnya infrastruktur maupun kurangnya tenaga kerja yang terlatih, maka akan menyebabkan ketimpangan pembangunan semakin

melebar. Oleh karena itu, jika di dalam suatu pembangunan tidak didorong oleh fasilitas yang mendorong dalam pertumbuhan ekonomi di daerah yang tertinggal maka ketimpangan pendapatan akan semakin melebar.

Teori Human Capital menurut becker dalam (Febriyani & Anis, 2021) menyatakan bahwa Indeks Pembangunan Manusia memiliki dampak negatif terhadap ketimpangan distribusi pendapatan. Becker melakukan analisisnya mengenai kontribusi pendidikan formal terhadap pertumbuhan ekonomi, yang menyatakan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan formal yang diperoleh oleh seseorang, maka produktivitas tenaga kerja meningkat secara proposional. Dikarenakan kenaikan pendapatan yang disertai dengan peningkatan tingkat pendidikan pada setiap individu, dapat mendukung pertumbuhan ekonomi masing – masing penduduknya. Pertumbuhan ekonomi tersebut, baik secara langsung maupun tidak langsung yang dianggap sebagai mengurangi ketimpangan pendapatan.

Ketimpangan pendapatan juga dipengaruhi oleh tingkat kesejahteraan dalam melihat kualitas pada masyarakatnya. Dikarenakan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), mencakup 3 dimensi dasar diantaranya : kesehatan (dinyatakan dalam umur harapan hidup), pendidikan (dinyatakan dalam harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah), serta standar hidup yang layak. Semakin tinggi Indeks Pembangunan Manusia, maka semakin tinggi produktivitas penduduknya sehingga berpengaruh pada tingkat pendapatan dan sebaliknya apabila semakin rendah Indeks Pembangunan Manusia, maka menurunnya produktivitas penduduknya sehingga menurunnya tingkat pendapatan.



Sumber: BPS Sumatera Utara

Gambar 1.4 Grafik IPM Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 – 2022

Dengan melihat adanya kemajuan pembangunan dalam jangka panjang dapat dilihat melalui Indeks Pembangunan Manusia. Dapat dilihat dalam Grafik 1.4 IPM mengalami peningkatan dari tahun 2017 – 2022, pada tahun 2017 Indeks Pembangunan Manusia sebesar 70.57% dan tertinggi di tahun 2022 sebesar 72.71%. Capaian ini merupakan agresi dari tiga dimensi. Dimensi pertama yaitu: umur panjang dan hidup sehat yang diwakili oleh umur harapan hidup (UHH) saat lahir. Umur harapan hidup saat bayi lahir ini merupakan indikator yang dapat mencerminkan tingginya kesehatan di suatu wilayah, baik dari sarana prasarana, akses, hingga kualitas kesehatannya. Kesehatan itu sendiri merupakan salah satu bagian vital dari sebuah kehidupan manusia. Di tahun 2022 rata – rata bayi yang baru lahir untuk hidup semakin besar dikarenakan membaiknya derajat kesehatan di suatu masyarakat. Faktor yang mempengaruhinya seperti: kemajuan teknologi di

bidang kesehatan, meningkatnya sarana dan prasarana kesehatan serta kepedulian masyarakat terhadap pola hidup sehat, seperti (mengonsumsi makanan bergizi seimbang, minum air putih yang cukup, melakukan kegiatan olahraga minimal 30 menit dan menjaga kebersihan diri dan lingkungan sekitarnya). Dimensi kedua yaitu: harapan lama sekolah dan rata – rata lama sekolah. Indikator Harapan Lama Sekolah penduduk Provinsi Sumatera Utara tercatat semakin meningkat dalam kurun waktu tahun 2017 – 2022.

Pada tahun 2022, angka harapan lama sekolah mencapai 13.31 tahun yang memiliki arti bahwa rata – rata anak berusia 7 tahun yang masuk jenjang pendidikan pada tahun 2022 diharapkan mampu bersekolah hingga 13.31% tahun atau setara Diploma 1. Harahap Lama Sekolah ini menggambarkan sebagai proses pembangunan yang mengukur keberhasilan program pendidikan dalam jangka panjang. Sedangkan rata – rata lama sekolah pada periode 2022 mencapai 9,71 tahun. Hal ini menggambarkan bahwa secara rata – rata penduduk Sumatera Utara yang berusia 25 tahun keatas telah menempuh jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP). Dimensi ketiga yaitu: indikator pengeluaran riil perkapita yang disesuaikan dengan kemampuan masyarakat dalam membelajakan uangnya dalam bentuk barang maupun jasa.

Dengan adanya kemampuan daya beli masyarakat antar wilayah menjadi terbanding dan perlu adanya dibuat standarisasi. Dengan adanya standarisasi ini, maka dapat dilihat adanya perbedaan kemampuan daya beli masyarakat antar suatu wilayah tersebut. Pada tahun 2022 tercatat pengeluaran perkapita sebesar 10,85%. Sehingga hal ini Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Sumatera Utara

berkembang dengan baik. Sedangkan Indeks Gini di provinsi Sumatera Utara tahun 2017 – 2022 cenderung menurun dikarenakan Pemerintah itu sendiri telah meningkatkan kesejahteraan masyarakat dari akses pendidikan yang lebih baik yang memungkinkan masyarakat untuk memperoleh keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk mendapatkan pendapatan yang lebih tinggi. Dengan mendapatkan pendapatan yang lebih tinggi, hal ini mempengaruhi tingkat kesejahteraan individunya dalam masyarakat. Dan adanya akses kesehatan yang lebih baik dalam meningkatkan kualitas hidup dan produktivitas masyarakatnya. sehingga hal ini sesuai dengan Teori Human Capital menurut becker yang menyatakan bahwa Indeks Pembangunan Manusia memiliki dampak negatif terhadap ketimpangan distribusi pendapatan. Becker melakukan analisisnya mengenai kontribusi pendidikan formal terhadap pertumbuhan ekonomi, yang menyatakan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan formal yang diperoleh oleh seseorang, maka produktivitas tenaga kerja meningkat secara proposional. Dikarenakan kenaikan pendapatan yang disertai dengan peningkatan tingkat pendidikan pada setiap individu, dapat mendukung pertumbuhan ekonomi masing – masing penduduknya. Pertumbuhan ekonomi tersebut baik secara langsung maupun tidak langsung yang dianggap sebagai mengurangi ketimpangan pendapatan.

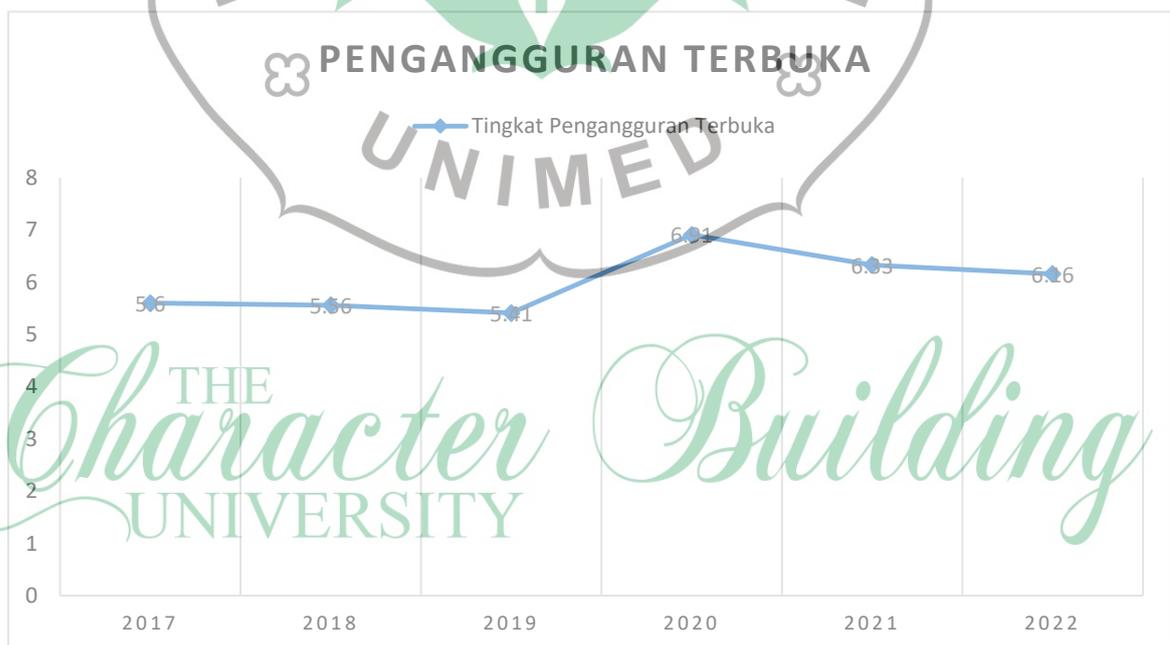
Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Putra, 2018) menyatakan bahwa Indeks Pembangunan manusia berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan, dikarenakan didalam penelitiannya menyatakan bahwa semakin tinggi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dalam suatu daerah, maka

akan merangsang dalam meningkatnya produktivitas yang pada akhirnya juga terjadi peningkatan pendapatannya dan mengurangi disparitas pendapatan pada daerah – daerah yang tertinggal. Sehingga, dengan kata lain terdapat hubungan yang negatif antara IPM dengan ketimpangan pendapatan.

Namun hal ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh (Ivanovi Sulistyaningrum et al., 2022) yang menyatakan bahwa Indeks Pembangunan Manusia tidak berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan dalam provinsi – provinsi Di Pulau Jawa Pada tahun 2011- 2020 dikarenakan dalam hal ini tidak meratanya Indeks Pembangunan Manusia dalam semua lapisan masyarakatnya yang berakibat pada kenaikan pendapatan yang besar belum tentu diikuti dengan peningkatan kualitas pembangunan manusia yang signifikan. Sehingga hal ini berakibat pada perbedaan kualitas Sumber Daya Manusia diberbagai daerah yaitu: pada daerah yang maju dengan daerah yang kurang maju tersebut.

Faktor utama yang turut mendorong ketimpangan terhadap pengangguran adalah adanya perbedaan yang signifikan dalam sebuah kondisi demografis di berbagai daerah. Kondisi demografis yang dimaksud mencakup variasi dalam tingkat pertumbuhan dan struktur kependudukan, perbedaan dalam tingkat pendidikan dan kesehatan, variasi dalam kondisi keternagakerjaan, serta perbedaan dalam perilaku, kebiasaan dan etos kerja masyarakat setempat. Dan kondisi demografis juga dapat mempengaruhi ketimpangan antar wilayah yang berdampak pada produktivitas kerja masyarakat di daerah tersebut (Sjafrizal, 2008)

Permasalahan pengangguran terjadi disebabkan oleh berkurangnya lapangan pekerjaan, ketidakmampuan lapangan pekerjaan di daerah perkotaan dalam menampung jumlah pengangguran dari waktu ke waktu. Sehingga dalam mengurangi tingkat pengangguran, diasumsikan dengan meningkatnya jumlah pekerja akan mendorong tingginya produktivitas dan meningkatnya pendapatan akan mengurangi terjadinya tingkat ketimpangan. Untuk mengurangi masalah pengangguran perlu adanya kebijakan yang dilakukan Pemerintah seperti: merencanakan pelatihan kewirausahaan bagi masyarakat itu sendiri agar termotivasi dalam menciptakan lapangan pekerjaan, sehingga dengan melakukan hal ini akan mengurangi tingkat ketimpangan tersebut. (Ningtyas & Nuraini Dwiputri, 2021)



Sumber: BPS Sumatera Utara

Gambar 1.5 Grafik Pengangguran Terbuka Provinsi Sumatera Utara

Tahun 2017 – 2022

Pada gambar grafik 1.5 pengangguran terbuka menunjukkan cenderung naik secara konstan pada tiap tahun, namun pada tahun yang diteliti pergerakan pengangguran terbuka naik di tahun 2020 dan kemudian turun di tahun 2021. Kenaikan pengangguran terbuka di tahun 2020 sebesar 6.91% hal ini dikarenakan dampak covid-19 dikarenakan banyak sektor usaha mengalami penurunan aktivitas seperti: sektor pariwisata, perdagangan dan transportasi, sehingga hal ini berakibat pada pemutusan hubungan kerja (PHK) sehingga berkurangnya lowongan pekerjaan. Dan di tahun 2021 menurun sebesar 6.33% dikarenakan pada tahun ini ekonomi mulai membaik hingga meningkatnya lapangan pekerjaan dan penghasilan yang memicu daya beli masyarakat dan berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi yang mendorong akan konsumsi pada rumah tangga.

Namun hal ini berbanding terbalik terhadap Indeks Gini di tahun 2020 Indeks Gini mengalami penurunan sebesar 0.3161 dikarenakan adanya pergeseran sektor pekerjaan akibat pandemic covid-19 sehingga berdampak redistribusi pendapatan, sehingga berdampak terhadap pekerja di sektor yang mengalami penurunan pendapatan yang lebih besar. Sehingga hal ini berkontribusi pada turunnya Indeks Gini di tahun 2020. Dan di tahun 2021 mengalami penurunan sebesar 0.3145 dikarenakan membaiknya kondisi ekonomi yang mendorong penciptaan lapangan pekerjaan baru, sehingga hal ini menyebabkan lebih banyak orang yang menganggur mendapatkan pekerjaan sehingga menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka tersebut. Sehingga hal ini sesuai dengan pernyataan

(Sjafrizal, 2008) yang menyatakan bahwa faktor utama yang turut mendorong ketimpangan adalah adanya perbedaan yang signifikan dalam sebuah kondisi demografis di berbagai daerah. Kondisi demografis yang dimaksud mencakup variasi dalam tingkat pertumbuhan dan struktur kependudukan, perbedaan dalam tingkat pendidikan dan kesehatan, variasi dalam kondisi keternagakerjaan, serta perbedaan dalam perilaku, kebiasaan dan etos kerja masyarakat setempat. Dan kondisi demografis juga dapat mempengaruhi ketimpangan antar wilayah yang berdampak pada produktivitas kerja masyarakat di daerah tersebut. Wilayah dengan kondisi demografis yang baik cenderung memiliki produktivitas kerja yang lebih tinggi, mendorong peningkatan investasi yang kemudian meningkatkan penyediaan lapangan pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut. Sebaliknya, jika suatu daerah memiliki kondisi demografis yang kurang baik, produktivitas kerja masyarakat setempat akan relatif rendah, maka daerah tersebut kurang menarik dalam melakukan investasi dan memicu akan pertumbuhan ekonominya menjadi lebih lambat.

Sehingga tingkat pengangguran yang tinggi menunjukkan bahwa kesejahteraan masyarakat yang masih rendah. Sebaliknya, tingkat pengangguran yang rendah menunjukkan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. Indikator ini sangat penting bagi suatu Negara apabila memiliki jumlah penduduk yang besar, karena dengan adanya penyediaan lapangan pekerjaan yang lebih banyak maka menjadi sebuah tujuan utama pembangunan daerah yang bersifat berkelanjutan tersebut.

Penelitian yang dilakukan oleh (Hariani, 2019) yang menyatakan bahwa tingkat pengangguran terbuka berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap

ketimpangan pendapatan antar Kabupaten/Kota di Jawa Timur. Dikarenakan faktor penyebabnya dikarenakan kurang diperhatikan oleh Pemerintah dalam hal kesempatan kerja sehingga Pemerintah daerah harus melakukan penyesuaian kembali antara kebijakan dalam meningkatkan upah buruh dan pekerja terhadap kebutuhan hidup yang layak

Namun hal ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh (Anti Nur Izzati, Lorentino Togar Laut, 2021) yang menyatakan bahwa tingkat pengangguran terbuka berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi DIY tahun 2010 – 2019 hal ini disebabkan oleh banyaknya pengangguran terbuka lebih banyak terjadi di daerah dengan struktur ekonomi yang bercocok non agraris (Gunung Kidul, Kulon Progo dan Bantul) atau daerah perkotaan (Sleman dan Yogyakarta), rendahnya pengangguran terbuka di daerah pedesaan disebabkan oleh masyarakatnya tidak terlalu memilih dalam pekerjaan sehingga, meskipun tingkat pengangguran terbuka di daerah perkotaan lebih tinggi daripada daerah pedesaan. Maka tingkat ketimpangan pendapatan dapat menurun dan berakibat pendapatan masyarakat merata, namun pemerataan ini berada di perekonomian kategori yang rendah.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan dan beberapa penelitian terdahulu. Penelitian ini akan mencoba meneliti bagaimana pengaruh pertumbuhan ekonomi, indeks pembangunan manusia dan pengangguran terbuka terhadap ketimpangan pendapatan di Sumatera Utara. Sehingga, untuk itu penulis mengangkat dalam sebuah skripsi dengan judul: **“ANALISIS PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI, INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA DAN**

PENGANGGURAN TERBUKA TERHADAP KETIMPANGAN PENDAPATAN DI SUMATERA UTARA.”

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan penjelasan dalam latar belakang, ditemukan masalah – masalah berikut:

1. Ketimpangan Pendapatan di Sumatera Utara cenderung menurun dari tahun 2017 – 2022.
2. Pertumbuhan ekonomi di Sumatera Utara cenderung mengalami fluktuasi dan pada tahun 2020 mengalami penurunan akibat Covid 19 yang melanda di seluruh dunia.
3. Indeks Pembangunan Manusia di Sumatera Utara setiap tahunnya mengalami kenaikan.
4. Pengangguran Terbuka di Sumatera Utara cenderung mengalami kenaikan.

1.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka penulis membatasi masalah menjadi:

1. Objek di dalam penelitian adalah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara tahun 2017 – 2022.
2. Penelitian ini mengangkat variabel dependen yaitu: Ketimpangan Pendapatan Di Provinsi Sumatera Utara tahun 2017 – 2022.

3. Variabel Independen dalam penelitian ini yaitu: Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia dan Pengangguran Terbuka di Provinsi Sumatera Utara tahun 2017 – 2022.

1.4 Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang tersebut, sehingga yang akan menjadi identifikasi masalah dalam penelitian ini meliputi:

1. Bagaimana pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap ketimpangan pendapatan antar Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara?
2. Bagaimana pengaruh Indeks Pembangunan Manusia terhadap ketimpangan pendapatan antar Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara?
3. Bagaimana pengaruh Pengangguran Terbuka terhadap Ketimpangan Pendapatan antar Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara?
4. Bagaimana pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia, Pengangguran Terbuka secara simultan terhadap Ketimpangan Pendapatan antar Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara?

1.5 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Ketimpangan Pendapatan antar Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara.

2. Untuk mengetahui pengaruh Indeks Pembangunan Manusia terhadap Ketimpangan Pendapatan antar Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara.
3. Untuk mengetahui pengaruh Pengangguran Terbuka terhadap Ketimpangan Pendapatan antar Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara.
4. Untuk mengetahui pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia, Pengangguran Terbuka secara simultan terhadap Ketimpangan Pendapatan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara.

1.6 Manfaat Penelitian

Berikut manfaat yang diperoleh dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagi Penulis

Mengimplementasikan ilmu pengetahuan yang didapatkan dari bangku perkuliahan serta meningkatkan pemahaman yang lebih luas terkait kajian yang diteliti.

2. Bagi Masyarakat / Pemerintah

Menjadikan salah satu referensi yang digunakan bagi masyarakat / Pemerintah dalam menentukan langkah, serta kebijakan dalam menunjukkan sebuah wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara.

3. Bagi Akademisi

Sebagai bahan ajar dan menambah ilmu pengetahuan bagi mahasiswa / mahasiswi Fakultas Ekonomi, khususnya pada prodi Ilmu Ekonomi untuk meningkatkan

edukasi pembelajaran. Serta sebagai landasan untuk melakukan penelitian lebih lanjut dan tertarik dalam mempelajari topik yang sama tersebut.



THE
Character Building
UNIVERSITY